

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Pak Ogah dalam mengatur lalu lintas di persimpangan arus putar balik Jalan Moh. Hatta (Depan Kantor KAN), Jalan Bypass Kuranji (Taratak Paneh), Jalan Prof. Dr. Hamka. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di tiga lokasi tersebut, dapat ditarik tiga kesimpulan utama sebagai berikut.

Pertama, mekanisme kerja Pak Ogah merupakan sistem yang terbentuk melalui proses objektivasi sosial. Tanpa regulasi formal, para Pak Ogah berhasil membangun sistem giliran bertugas, penggunaan atribut dan isyarat sebagai simbol legitimasi, serta pengelolaan pendapatan individual yang diakui dan dipatuhi oleh seluruh anggota kelompok. Sistem ini berbeda di setiap lokasi bergantung pada konteks sosial dan kondisi lapangan, namun memiliki prinsip dasar yang serupa: kesepakatan informal yang lahir dari habitualisasi tindakan berulang. Penggunaan atribut seperti rompi dan peluit tidak sekadar berfungsi sebagai perlengkapan kerja, melainkan sebagai simbol yang secara sosial mengonstruksi otoritas Pak Ogah di mata para pengendara.

Kedua, latar belakang para Pak Ogah di ketiga lokasi penelitian didominasi oleh kondisi keterbatasan akses terhadap lapangan kerja formal. Pilihan menjadi Pak Ogah bukanlah aspirasi, melainkan strategi bertahan hidup yang diambil ketika jalur formal tertutup atau tidak tersedia. Keterbatasan fisik akibat kecelakaan kerja,

berakhirnya kontrak kerja, kegagalan mendapat pekerjaan, dan tidak adanya borongan bangunan menjadi faktor-faktor pendorong yang mendorong individu masuk ke dunia Pak Ogah. Dalam semua kasus tersebut, jaringan pertemanan dan kedekatan geografis menjadi modal sosial yang memfasilitasi akses mereka ke kelompok yang sudah ada. Kondisi ini merupakan manifestasi dari proses eksternalisasi, di mana individu mencurahkan dirinya ke dalam dunia sosial melalui aktivitas yang paling memungkinkan sesuai kapasitas yang dimilikinya.

4.2 Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut.

Pertama, bagi pemerintah daerah Kota Padang khususnya Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja, diharapkan untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih humanis dalam menangani keberadaan Pak Ogah. Alih-alih melakukan penertiban berulang yang terbukti tidak menyelesaikan akar masalah sebagaimana terlihat dari fakta bahwa Pak Ogah selalu kembali bertugas setelah ditangkap pemerintah perlu mengeksplorasi kemungkinan formalisasi peran Pak Ogah melalui program kemitraan. Program tersebut dapat mencakup pemberian identitas resmi, pelatihan keselamatan lalu lintas, dan jaminan sosial minimal kepada mereka yang bertugas secara konsisten.

Kedua, bagi instansi terkait seperti kepolisian lalu lintas dan Dinas Perhubungan, perlu dipertimbangkan penempatan petugas resmi yang lebih konsisten di titik-titik putar balik yang padat terutama pada jam-jam sibuk agar ketergantungan

masyarakat pada Pak Ogah dapat dikurangi secara bertahap tanpa menimbulkan kekacauan lalu lintas. Apabila hal tersebut tidak memungkinkan karena keterbatasan sumber daya manusia, maka pemasangan rambu lalu lintas yang lebih lengkap dan lampu pengatur di titik-titik tersebut perlu menjadi prioritas.

Ketiga, bagi masyarakat dan pengendara, diharapkan untuk tetap bersikap kooperatif dan menghargai keberadaan Pak Ogah selama mereka menjalankan tugasnya dengan itikad baik tanpa pemaksaan. Memberikan imbalan yang wajar dan memperlakukan mereka dengan hormat adalah bentuk pengakuan terhadap kontribusi nyata yang mereka berikan dalam menjaga kelancaran lalu lintas di titik-titik yang tidak terlayani secara optimal oleh petugas resmi.

Keempat, bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji fenomena serupa, penelitian ini dapat dikembangkan dengan memperluas kajian ke dimensi kebijakan publik dan hukum terkait status Pak Ogah dalam regulasi lalu lintas nasional, serta memperluas cakupan ke kota-kota lain di Indonesia untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang fenomena pengatur lalu lintas informal dalam konteks pembangunan perkotaan yang tidak merata. Kajian komparatif antar kota juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor apa saja yang menentukan apakah Pak Ogah diterima, ditoleransi, atau ditertibkan oleh pemerintah daerah setempat.